

HARIAN

MERDEKA

aspirasi rakyat



Dituding Underbow PKI di Majalah Kemenag, GMNI Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) melaporkan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Koordinator Wilayah Jawa Timur ke Bareskrim Polri.

Hal tersebut buntut beredarnya majalah yang disebut diproduksi Kemenag, yang

Bersambung ke
Halaman 11

Korupsi Lahan Inhutani V, Kejagung Periksa Eks Bupati Way Kanan Bustami Zainudin

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Tim penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung memeriksa mantan Bupati Way Kanan Bustami Zainudin sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan oleh PT PSMI di areal PT Inhutani V Lampung.

“BZ selaku mantan Kepala Daerah Way Kanan periode 2010 sampai dengan 2015,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum)

Kejaksaan Agung Anang Supriatna dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Bersambung ke
Halaman 11

JASAD DI ENGGANO ADALAH AWAK KAPAL 5 JURNALIS

SERANG |
Harian Merdeka

Teka-teki penemuan sesosok mayat laki-laki tanpa identitas di perairan Sawang Bangkok, Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano,

Provinsi Bengkulu, akhirnya menemui titik terang. Lewat uji DNA, jenazah tersebut dipastikan sebagai Surakman, anak buah kapal (ABK) KM Arupadhatu 1 yang angkut lima jurnalis yang sebelumnya dilaporkan hilang.

Mayat yang sempat dilabeli sebagai “Mr X” ini pertama kali ditemukan pada Sabtu (12/9/2026). Saat ditemukan, korban memiliki ciri-ciri

Bersambung ke
Halaman 11





InaExport Diperkuat Jadi Gerbang Ekspor Nasional, Kemendag Gandeng 19 Mitra Strategis

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkuat platform digital InaExport sebagai gerbang ekspor nasional atau national export gateway. Penguatan tersebut ditandai dengan peluncuran terbatas (soft launching) sejumlah layanan baru InaExport pada Selasa, 22 September 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, transformasi InaExport diarahkan untuk memperluas akses pasar bagi produk-produk Indonesia, khususnya produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki potensi menembus pasar internasional.

“Produk UMKM kita yang berkualitas perlu didukung dengan ekosistem yang ramah untuk merambah pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, kita perlu etalase yang dapat mempromosikan produk-produk tersebut. Salah satu etalase yang kita miliki adalah platform InaExport,” kata Budi Santoso.

InaExport selama ini dikelola Kemendag sebagai etalase digital sekaligus sarana promosi produk lokal. Dalam pengembangan terbaru, platform tersebut diperkuat dengan lima layanan utama yang dirancang untuk mempertemukan kebutuhan eksportir dan pembeli internasional dalam satu ekosistem.

Layanan pertama adalah CEK Ekspor, yang dapat digunakan eksportir untuk melakukan asesmen mandiri sekaligus validasi. Instrumen ini ditujukan untuk memetakan tingkat kesiapan ekspor serta mengidentifikasi kebutuhan pembinaan, pembiayaan, promosi hingga fasilitasi pasar. ● (Agus)

UU Reforma Agraria Resmi Disahkan, Gerbang Tani Siap Kawal Implementasi



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dewan Pengurus Nasional Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengaturan Reforma Agraria menjadi Undang-Undang (UU) pada hari ini.

Pengesahan ini dinilai sebagai tonggak sejarah dan angin segar bagi perjuangan perwujudan keadilan agraria di Indonesia.

Ketua Umum Gerbang Tani, Idham Arsyad, menegaskan bahwa kelahiran Undang-Undang ini merupakan jalan terang untuk mengoreksi ketimpangan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang selama ini membelenggu petani, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya.

“Kelahiran Undang-Undang ini adalah jawa-

ban atas tuntutan panjang rakyat. Ini merupakan instrumen hukum yang kuat untuk menyelesaikan konflik agraria yang bersifat struktural dan menahun. Kita akhirnya memiliki pijakan untuk melakukan koreksi total atas kebijakan penetapan hak atas tanah-tanah rakyat di masa lalu yang seringkali meminggirkan masyarakat dan menjadi akar meletusnya konflik agraria di berbagai daerah,” ujar Idham Arsyad.

Gerbang Tani menilai bahwa UU Pengaturan Reforma Agraria membawa harapan baru bagi penataan struktur agraria yang berkeadilan. Salah satu poin paling krusial dan patut dirayakan adalah adanya mandat pembentukan kelembagaan khusus yang secara fokus dan komprehensif mengurus pelaksanaan reforma agraria.

Selama ini, proses penyelesaian konflik dan redistribusi tanah selalu berjalan lambat dan berlarut-larut. Idham menyoroti bahwa

kebuntuan tersebut terjadi karena kewenangan urusan pertanahan dan agraria yang tumpang tindih serta terfragmentasi di berbagai Kementerian dan Lembaga (K/L).

“Selama puluhan tahun, penyelesaian konflik agraria tersandera oleh ego sektoral kementerian dan lembaga. Kewenangan yang terfragmentasi membuat rakyat dipinggir dari satu meja ke meja lain tanpa kepuasan,” tegas Idham.

“Dengan dimandatkan-nya kelembagaan khusus yang terintegrasi dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, ini adalah terobosan kelembagaan yang luar biasa. Eksekusi penyelesaian ketimpangan dan konflik agraria kini memiliki garis komando yang jelas, kuat, dan tidak lagi terjebak dalam birokrasi kementerian yang berbelit-belit,” tambahnya.

Sebagai penutup, Idham Arsyad menyatakan bahwa Gerbang Tani akan senantiasa berdiri bersama petani dan masyarakat luas untuk mengawal ketat implementasi Undang-Undang ini. Gerbang Tani berharap peraturan turunan dan pembentukan kelembagaan khusus ini dapat segera direalisasikan oleh Presiden agar cita-cita reforma agraria yakni Keadilan dan Kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Konstitusi Pasal 33 UUD 1945 segera terwujud. ● (Egi)

Redaksi **MERDEKA**

Diterbitkan Oleh : PT.JAKARTA RAYA PERS

Pemimpin Umum : Helmy Halim, Pemimpin Perusahaan : Alan Oskar, Wakil Pemimpin Perusahaan : Verencia Mercy, Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab : Helmy Halim, Wakil Pemimpin Redaksi : Abdul Rohman, Redaktur Eksekutif : Egi Hendrawan, Redaktur Pelaksana : Agus Irawan, Redaktur : Andri Achdiat, Budi Santoso, Taufik, Saepudin, Adam Kamal, Reporter : Aceng Abidin, Ahmad Baladi, Sahrul, Robi Liu, Prayitno, Edi.ST, Nurziman, Rafiudin, Abdul Aziz, Siti Marko, RA. Sudrajat, Syarif Hidayat, Irwani Heliawan, Abidin, Hasuri, Mukhtar, Jan Zarian, Juli Rabiati, H.Mulyadi, Didit, Daenk, Ali.R., Kabirol Medan : Umar, S.Pd.I Perwakilan Nias (Sumut) Adi Laoli, Sekretaris Redaksi : Syafina Azzahra, Keuangan : Yosefin Arwinda Devi, Manager Iklan : Muksin, P.Adi, Iklan : S Fajar, Wilki Irawan, Pemasaran : Hendro, Anwar, Saunan, Agus Black, Dian, Layout : Bobby Saputra, Fuad, IT Web : Walid, Amel, Bagian Umum/OB : Wawan, Penasehat Hukum : Hanafi Tanawijaya, SH, Dedi Suryadi. SH

Kantor Usaha/Redaksi : Rukan Golden Fatmawati, Jl.RS Fatmawati G-34 No.15 RT.008 RW.006, Gandaria Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. NO. REK. BANK MANDIRI KCP JAKARTA KEMENDIKBUD 1220011807917 a/n JAKARTA RAYA PERS.Telp: 081212262686

Kantor Perwakilan : Ruko ModernLand Blok R 30, Jalan Hartono Raya Kelurahan Kelapa Indah Kecamatan Tangerang Kota Tangerang Telepon : (021) 59728637. (isi di luar tanggungjawab percetakan)

Gandeng BIG, JAM-Intel Wanti-Wanti Pelanggaran dalam Proyek Strategis Nasional



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel) Reda Manthovani mengingatkan pengamanan terhadap proyek-proyek strategis nasional (PSN) yang dilakukan Kejaksaan sama sekali tidak untuk melegalkan atau untuk melindungi tindakan yang melanggar hukum.

“Apabila dalam perjalanan ditemukan adanya praktik penyimpangan, maka pihak yang bersangkutan tetap harus bertanggung-jawab secara administrasi, perdata, maupun pidana,” tegas Reda saat penanda-

tanganan Pakta Integritas dan Entry Meeting Pengamanan Pembangunan Strategis Kegiatan Penyediaan Peta Dasar

Skala Nasional Besar (1:5.000) dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) di Gedung Utama, Kejaksaan, Jakarta, Selasa (22/09/2026).

Reda menyebutkan penandatanganan Pakta Integritas merupakan simbol komitmen bersama antara Kejaksaan dan BIG untuk bertindak profesional, transparan, objektif, serta bebas dari praktik kolusi, korupsi, nepotisme, maupun transaksi yang tidak sah.

Dia sebelumnya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan BIG kepada Kejaksaan untuk mengawal dan mengamankan proyek strategis nasional berupa penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) yang menjadi kebutuhan nasional yang sangat

mendesak.

“Ketersediaan peta dasar akurat ini menjadi instrumen vital dalam menyelesaikan sengketa lahan. Serta mengatasi tumpang tindih perizinan usaha yang selama ini menyandera iklim investasi,” kata Reda.

Selain itu, ujarnya, peta dasar skala besar berperan penting sebagai basis data penerapan Online Single Submission berbasis Rencana Detail Tata Ruang, memperkuat mitigasi bencana dan ketahanan nasional terhadap perubahan iklim, serta mendukung ketercapaian 8 Program Hasil Terbaik Cepat Asta Cita Presiden Republik Indonesia

Oleh karena itu, katanya lagi, kegiatan penyediaan Peta Dasar Skala Besar ini telah ditetapkan sebagai salah satu indikasi PSN dalam Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

“Setelah keberhasilan penyediaan peta dasar wilayah Sulawesi pada tahun 2024 menggunakan dana rupiah murni. Pelaksanaan periode 2025 hingga 2029 dilanjutkan untuk seluruh wilayah darat Indonesia lainnya melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project yang didanai Perjanjian Pinjaman Bank Dunia Nomor 9732-ID. Proyek

ILASPP total sebesar 653 juta dolar AS,” ungkapnya.

Adapun, kata dia, alokasi untuk Komponen 4 yang dikelola Badan Informasi Geospasial mencapai 298 juta dolar AS dengan terbagi ke dalam empat paket pekerjaan utama. “Yaitu mencakup pemetaan wilayah urban menggunakan teknologi foto udara dan LiDAR, pemetaan wilayah nonurban dengan airborne synthetic aperture radar serta citra satelit resolusi tinggi, penyusunan peta dasar skala menengah dan kecil wilayah Sulawesi, hingga kontrak kontrol dan penjaminan kualitas atas seluruh rangkaian pekerjaan.”

Reda menuturkan dalam mengawal jalannya proyek, Tim PPS Intelijen Kejaksaan berlandaskan Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis JAM-Intel guna memitigasi berbagai potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan.

“Berdasarkan hasil identifikasi, potensi kerawanan mencakup masalah personel seperti risiko intervensi dan intimidasi terhadap tim pelaksana,” katanya seraya menyebutkan masalah materiil dan aset juga menjadi perhatian utama akibat tingginya risiko pengadaan bernilai besar. ● (Egi)

Ziarah Makam Pahlawan, Panglima TNI Teladani Semangat Perjuangan Pendahulu

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melaksanakan ziarah ke makam Presiden RI ke-2 Jenderal Besar (Purn) Soeharto di Astana Giribangun, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Selasa (22/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI.

Selain itu, Jenderal

Agus juga berziarah ke makam Panglima Besar Jenderal Soedirman di Kota Yogyakarta, Provinsi DIY. Ziarah tersebut menjadi momentum untuk mengenang perjuangan dan keteladanan para pendahulu TNI yang telah meletakkan fondasi perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Momentum peringatan HUT ke-81 TNI ini sekal-



igus menjadi pengingat bagi seluruh prajurit untuk terus menjaga dan meneruskan semangat perjuangan para pen-

dahulu dalam melaksanakan tugas,” kata Agus dalam siaran pers di Jakarta.

Menurut Agus, dengan

berpegang pada nilai-nilai patriotisme, pengabdian, dan kesetiaan kepada bangsa dan negara, TNI berkomitmen untuk senantiasa menjaga keutuhan, kedaulatan, serta keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun peringatan HUT ke-81 TNI yang semula digelar di Monas, Jakarta Pusat dipindahkan ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada 5 Oktober 2026.

● (Egi)



Hendri Soroti Aktivitas Gibran di Tengah Warga: Disebut "Kampanye Canggih"

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Aktivitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang kerap turun langsung ke tengah masyarakat mendapat sorotan. Pengamat politik Hendri menilai pola tersebut memiliki dimensi politik yang perlu dicermati, meski tidak dilakukan dalam bentuk kampanye terbuka.

Hendri bahkan menyebut pola pendekatan tersebut sebagai bentuk "kampanye canggih" yang menurutnya perlu diperhatikan publik.

"Iya, jadi maksud gue ini tuh kampanye canggih. Lo harus hati-hati sama Gibran," kata Hendri dalam sebuah podcast yang dikutip Senin (21/9/2026).

Menurut Hendri, aktivitas pejabat yang hadir langsung di tengah masyarakat memiliki karakter berbeda dengan kampanye politik konvensional.

Jika kampanye terbuka umumnya ditandai dengan deklarasi, penyampaian visi-misi, atau ajakan memilih, kehadiran pejabat dalam berbagai kegiatan masyarakat dapat berlangsung dalam konteks menjalankan tugas pemerintahan. Namun, menurut penilaiannya, intensitas pertemuan langsung tersebut juga dapat membangun kedekatan personal dengan masyarakat.

Kedekatan itu, kata Hendri, berpotensi menjadi modal politik apabila dikaitkan dengan kontestasi elektoral di masa mendatang sorotan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap dinamika politik menuju Pemilu 2029.

Gibran sendiri merupakan salah satu figur politik yang kerap diperbincangkan dalam bursa politik nasional mendatang. Meski demikian, penyebutan aktivitas tersebut sebagai "kampanye canggih" merupakan penilaian Hendri, bukan kesimpulan resmi mengenai adanya kampanye politik.

Aktivitas seorang pejabat negara di tengah masyarakat juga dapat merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan agenda pemerintahan. Karena itu, publik perlu membedakan antara kegiatan resmi seorang pejabat dengan aktivitas yang secara faktual memenuhi unsur kampanye politik.

● (Agus)

Hanura Tolak Wacana Syarat Dukungan Dua Fraksi untuk Capres



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wacana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) wajib didukung minimal dua fraksi di DPR dinilai tidak memiliki landasan hukum jelas.

Wakil Ketua Umum Partai Hanura Patrice Rio Capella mengingatkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menghapus ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU Pemilu.

"Saya tidak mengerti siapa yang memberikan masukan tidak cerdas itu. Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan bahwa PT Presiden itu 0 persen," kata Rio dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 22 September 2026.

Ia menilai putusan MK telah memberikan hak kepada seluruh partai politik peserta Pemilu untuk mengusulkan pasangan capres-cawapres. Maka Hanura merasa heran jika hak yang telah diputuskan MK tersebut justru dibatasi melalui syarat dukungan minimal dua fraksi di DPR.

Rio juga mengingatkan, fraksi di DPR berbeda dengan partai politik peserta Pemilu. Ketentuan pencalo-

nan presiden harus memiliki dasar konstitusional dan hukum yang jelas.

"Kita berpolitik, kita bernegara ini harus ada landasan konstitusionalnya. Ada landasan hukumnya, yaitu putusan MK. Putusan MK itu adalah putusan mengikat," tegas Ketua Tim Task Force DPP Hanura tersebut.

Ia menegaskan, setiap ketentuan baru yang mengatur pencalonan presiden tetap harus mengacu pada putusan MK.

"Apa pun yang dilakukan yang mengingkari atau membangkang dari putusan MK itu ketika dilakukan JR (judicial review) itu pasti kembali lagi ke 0 persen," ujarnya.

Oleh karenanya, Rio mengajak seluruh pihak membangun wacana politik yang memiliki dasar hukum jelas. Setiap gagasan terkait sistem pencalonan presiden harus memperkuat kualitas demokrasi dan tidak menimbulkan kebingungan publik.

"Bukan demokrasi yang sekadar berwacana dan bercerita yang tidak ada dasarnya. Syarat bahwa dua fraksi itu, saya pikir apa lan-

dasan hukumnya? Pikiran-pikiran yang disampaikan kepada publik itu sebaiknya pikiran-pikiran yang cerdas, jangan pikiran yang membingungkan publik," pungkas Rio.

Wacana pasangan capres-cawapres mendapat dukungan minimal dua fraksi di DPR mengemuka dalam pembahasan perubahan UU Pemilu. Gagasan tersebut muncul setelah MK menghapus ketentuan presidential threshold 20 persen melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Dalam putusannya, MK menegaskan seluruh partai politik peserta Pemilu memiliki hak mengusulkan pasangan capres-cawapres. MK juga menyatakan pengusulan tidak boleh didasarkan pada persentase jumlah kursi DPR maupun perolehan suara sah secara nasional.

Namun, MK juga menyatakan pembentuk undang-undang dapat melakukan rekayasa konstitusional untuk mencegah jumlah pasangan capres-cawapres menjadi terlalu banyak, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip konstitusional. ● (Egi)



JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono merespons soal rencana pembangunan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Dave mengatakan penambahan Kodam merupakan bagian dari strategi besar TNI untuk memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat, termasuk warga Papua.

“Memang, itu sudah bagian dari grand strategy-nya, untuk memberikan perlindungan kepada warga Indonesia, seluruh warga Papua, memastikan pembangunan di berbagai macam bidang dan sektor itu dapat berjalan,” kata Dave di Kompleks

Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9).

Menurut Dave, Komisi I memandang pembangunan Kodam baru sebagai hal yang penting. Selain menjalankan fungsi pertahanan, pembangunan instalasi militer di sejumlah daerah dinilai dapat memberikan efek ekonomi kepada masyarakat sekitar.

“Penting, tentunya. Karena pembangunan Kodam, pembangunan instalasi-instalasi militer itu memberikan juga dampak efek ekonomi kepada masyarakat setempatnya, gitu kan,” tutur Dave.

Dave menjelaskan, dampak ekonomi tersebut salah satunya muncul dari kebutuhan prajurit yang nantinya ditempatkan di wilayah tersebut. Keberadaan personel TNI akan menciptakan kebutuhan terhadap berbagai barang dan jasa di lingkungan sekitar.

“Sehingga nanti penempatan prajurit di sana memastikan ada mereka makan, mereka mem-

butuhkan berbagai macam hal. Nah, jadi itu memberikan domino efek yang tinggi,” jelas dia.

Sebelumnya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Muhammad Nas menyebut TNI berencana menambah lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru. Penambahan tersebut disebut berkaitan dengan strategi pertahanan wilayah, termasuk sebagai bagian dari konsep perlawanan rakyat semesta ketika menghadapi kondisi darurat atau ancaman musuh.

Nas mengatakan, lima Kodam baru tersebut akan diumumkan pada puncak peringatan HUT ke-81 TNI pada 5 Oktober 2026.

“Rencananya demikian, yang akan dibentuk Kodam baru nanti akan disampaikan lebih lanjut akan disampaikan,” kata Nas saat TNI Fair di Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (19/9).

Ditemui terpisah, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak

menjelaskan pembentukan Kodam berkaitan dengan tugas utama satuan tersebut sebagai komando kewilayahan.

Menurutnya, setiap Kodam memiliki tugas utama di bidang teritorial, meski penugasan masing-masing Kodam dapat berbeda.

“Jadi untuk yang Kodam, semua Kodam itu tugas utamanya adalah teritorial. Penugasannya berbeda,” kata Maruli.

Maruli menjelaskan, dalam kondisi darurat, Kodam memiliki peran untuk memimpin perlawanan terhadap musuh.

Maruli kemudian menyebut sejumlah wilayah yang akan menjadi lokasi pembentukan lima Kodam baru. Di antaranya Papua Tengah, NTT, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau.

“Jadi di Papua satu, di Papua Tengah. Iya, nanti ada, ada 5 yang baru di Flores, Yogya, Maluku, dengan satu lagi NTT, Kepulauan Riau,” kata Maruli.

● (Egi)

Perubahan APBD DKI 2026 Disetujui, Wagub Rano Pastikan Program Prioritas Tetap Berjalan

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menyampaikan pendapat akhir Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Selasa (22/9).

Sebelumnya, Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyepakati Perubahan APBD 2026 sebesar Rp79,56 triliun, turun dari APBD murni 2026 sebesar Rp81,32 triliun. Penyesuaian anggaran tersebut tetap menjaga layanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, dan bantuan

sosial.

Wagub Rano berharap persetujuan Perubahan APBD tersebut dapat menjaga momentum perekonomian Jakarta sekaligus memastikan seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana sesuai target.

“Dengan adanya persetujuan rapat dewan terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, eksekutif berharap perekonomian Jakarta di tahun 2026 akan terus meningkat dan seluruh program serta kegiatan dapat terlaksana sesuai rencana,” tegasnya.

Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta atas kesungguhan, kecermatan, dan ketelitian selama proses pembahasan Ranperda Perubahan



APBD 2026.

“Berbagai saran, komentar dan rekomendasi dari dewan yang disampaikan selama proses pembahasan, penyelesaian dan persetujuan peraturan daerah ini menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,” katanya.

Menurut Wagub Rano, kemitraan antara eksekutif dan legislatif perlu terus dijaga agar dapat menghasilkan program kerja strategis yang memberi manfaat bagi masyarakat Jakarta.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD atas persetujuan terhadap

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD diharapkan terus mendukung pelaksanaan pembangunan serta mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterakan seluruh warga.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Suhud Alynudin, Wakil Ketua DPRD Ima Mahdiah, serta para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta lainnya. ● (Agus)

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Terseret Kasus Silmy Karim, Presiden Komisaris Tempo Scan Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Presiden Komisaris Tempo Scan Group Handojo Selamat Muljadi pada Selasa (22/9) terkait dugaan pemberian sesuatu kepada salah satu pihak di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipias).

“Saksi didalam penyidik terkait dugaan pemberian yang dilakukan kepada oknum di Imipias,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu.

Ketika ditanya pemberian oleh Selamat terkait dengan apa, Budi menjelaskan bahwa hal tersebut diduga berkaitan dengan layanan keimigrasian.

“Terkait layanan keimigrasian,” katanya.

Sebelumnya, Selamat memenuhi panggilan KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan pemerasan yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Silmy Karim. Selamat tiba pada pukul 10.06 WIB di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Kasus tersebut bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA).

Dalam rangkaian OTT tersebut, Silmy Karim yang saat itu menjabat Wakil Menteri Imigrasi dan



Pemasarakatan menyerahkan diri kepada KPK.

Pada 4 Juni 2026, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal WNA periode 2022-2026 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian menjadi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Selain Silmy Karim yang pernah menjabat Direktur Jenderal

Imigrasi periode 2023-2024, KPK menetapkan Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Imigrasi periode 2024-2025 Saffar Muhammad Godam sebagai tersangka.

Enam tersangka lainnya adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Barat Jaya Saputra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat Ronald Arman Abdullah, Kepala Subdirektorat Direktorat Izin

Tinggal dan Status Keimigrasian Tassar Bayu Setyaji dan Bagus Bramantyo, Ketua Tim Alih Status Izin Tinggal Terbatas Juniadi Sri Priambudi, serta staf Subdirektorat Izin Tinggal Gusti Benardiansyah.

KPK menduga para tersangka memperoleh uang sekitar Rp145,5 miliar dari praktik pemerasan tersebut selama periode 2022-2026.

● (Egi)

KPK Buru Jejak Rp106,3 Miliar: Siapa Pengguna Akhir dan Benarkah Mengalir ke Lingkaran Nusron?

JAKARTA |
Harian Merdeka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak berhenti pada temuan uang tunai Rp106,3 miliar dalam perkara dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Kini, penyidik mulai membongkar jejak peruntukan uang tersebut. Pertanyaan yang tengah dikejar bukan hanya dari mana uang berasal, tetapi juga ke mana uang bergerak, siapa yang menguasai, dan siapa pengguna akhirnya.



Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan pihaknya masih mendalami informasi mengenai penggunaan uang tersebut, termasuk dugaan pemanfaatannya untuk kegiatan organisasi maupun kepentingan pribadi Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Apakah itu memang benar informasi-informasi penggunaan untuk kegiatan-kegiatan organ-

isasi atau bahkan untuk kegiatan-kegiatan pribadi saudara NW (Nusron Wahid), itu tentu menjadi bahan yang akan diperdalam oleh tim penyidik,” ujar Taufik di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Menurut Taufik, uang senilai Rp106 miliar lebih itu belum berhenti sebagai barang bukti. Penyidik masih akan menelusuri siapa pengguna uang tersebut dalam rangkaian pengembangan perkara.

“Tentunya uang-uang yang sebesar Rp106 sekian miliar itu untuk penggunaannya nanti akan ditelusuri lagi dalam proses penyidikan ke depan,” katanya.

Empat Tersangka Disebut Orang Kepercayaan Nusron Sorotan terhadap aliran dana semakin besar setelah KPK menyebut empat dari delapan tersangka dalam perkara ini diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.

Keempatnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry.

Selain empat nama tersebut, KPK menetapkan Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT

Summarecon Agung Adrianto Pitojo Adi, serta pihak swasta Rizal Pahlevi sebagai tersangka.

KPK sebelumnya mengungkap dugaan adanya pola pengumpulan uang dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan layanan pertanahan. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan penyidik, Arif disebut berperan sebagai pengepul uang dari pihak swasta, termasuk Erwin dan Muhammad Fakhry.

Rp2,1 Miliar dari Pengurusan HGB Bela Parahyangan Salah satu aliran uang yang telah diungkap KPK berkaitan dengan pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan.

● (Egi)

PT TNG: Pengelolaan Sesuai Ketentuan

Subsidi Angkutan Perkotaan Tangerang Dilaporkan ke Kejari



TANGERANG |
Harian Merdeka

Swastika Advokasi Nusantara (SAN) melayangkan somasi dan permohonan klarifikasi kepada PT Tangerang Nusantara Global (PT TNG) terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran Belanja Subsidi Angkutan Perkotaan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2025.

Selain somasi, SAN mengaku telah menyampaikan pengaduan kepada aparat penegak hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tangerang, pada 16 September 2026. Pengaduan tersebut berkaitan dengan realisasi subsidi angkutan perkotaan sebesar Rp41,77 miliar yang pelaksanaannya melibatkan PT TNG.

Ketua Umum SAN Surya mengatakan, pengaduan tersebut diperkuat dengan materi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten.

"Laporan sudah disampaikan pada 16 September. Terkait dugaan pembebanan realisasi subsidi anggaran sebesar Rp41,77 miliar yang direalisasikan melalui Dinas Perhubungan untuk angkutan umum perkotaan yang dilaksanakan oleh PT TNG," kata Surya, Rabu (23/9/2026).

Menurut Surya, Pemerintah Kota Tangerang mengalokasikan belanja subsidi sebesar



M. Rijal Dirut PT TNG

Rp42 miliar, dengan realisasi mencapai Rp41.770.627.522 atau 99,45 persen.

Salah satu hal yang menjadi perhatian SAN adalah pendapatan angkutan perkotaan selama 2025 yang disebut mencapai Rp3.092.036.000. Nilai tersebut berasal dari 1.546.018 penumpang dengan tarif Rp2.000 per penumpang.

"Temuan BPK menerangkan, rincian angka-angka tersebut terindikasi belum dimasukkan dalam pengurangan biaya subsidi," ujarnya.

Minta Rasio BBM Diperiksa Selain pendapatan layanan, SAN juga meminta Kejaksaan mendalami penggunaan rasio bahan bakar minyak (BBM) pada layanan Bus Rapid Transit (BRT) Koridor I.

Surya menyebut, dalam materi pemeriksaan BPK terdapat penyesuaian rasio BBM dari 3 kilometer per liter menjadi 4 kilometer per liter. Penyesuaian tersebut menghasilkan selisih per-

hitungan subsidi sebesar Rp530.580.617,32.

"Kami meminta angka tersebut diverifikasi menggunakan data operasional yang sebenarnya," katanya.

Menurut Surya, pemeriksaan dapat mencakup bukti pembelian BBM, invoice, transaksi SPBU, kilometer kendaraan, data GPS, logbook, jumlah perjalanan, jumlah armada, jadwal operasi hingga kondisi teknis kendaraan.

Soroti Kelebihan Pembebanan Subsidi

SAN juga menyoroti angka kelebihan pembebanan subsidi sebesar Rp3.622.616.617,32.

"Berdasarkan dokumen pengaduan, BPK merekomendasikan agar nilai tersebut diperhitungkan dalam pembayaran subsidi tahun berikutnya," ujar Surya.

Namun, ia menegaskan angka tersebut tidak serta-merta membuktikan adanya kerugian keuangan daerah akibat tindak pidana korupsi.

"Kami berharap APH Kejaksaan segera memeriksa pihak-pihak yang bertanggung jawab, kemungkinan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, serta aliran dana terkait subsidi," katanya.

SAN meminta aparat menguji sejumlah hal, antara lain perhitungan subsidi, pendapatan operasional, penggunaan parameter BBM, serta proses verifikasi data.

Surya mengatakan, jika ditemukan transaksi yang tidak berkaitan dengan kebutuhan operasional subsidi, pihak penerima maupun pihak yang memberikan persetujuan perlu ditelusuri.

"Penelusuran dapat dimulai dari anggaran APBD yang terserap ke Dinas Perhubungan, PT TNG, pengelola rekening operasional, vendor atau pemasok dan pihak lainnya," ucapnya.

● (Rhm)



Korupsi Tata Kelola Tambang PT PMM, Kejagung Periksa Dua Pegawai ESDM

JAKARTA | Harian Merdeka

Kasus dugaan korupsi tata kelola pertambangan yang menyeret PT Putraprima Mineral Mandiri (PMM) kembali bergulir. Kejaksaan Agung kini memperluas pemeriksaan dengan memanggil dua pegawai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai saksi.

Dua pegawai tersebut masing-masing berinisial HSR dan NS. Keduanya hadir memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (22/9/2026).

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan pemeriksaan dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan mineral bukan logam yang melibatkan PT PMM.

"Pemeriksaan saksi oleh penyidik dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud," kata Anang.

Langkah ini menambah panjang rangkaian penyidikan kasus PT PMM yang berkaitan dengan dugaan ekspor material mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) atau Rare Earth Element (REE), komoditas strategis yang tidak diperbolehkan untuk diekspor dalam kondisi tersebut.

Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni Iwan Setiawan selaku perwakilan PT PMM, Gian Prabharto selaku Kepala Unit Pelayanan PT Sucofindo Cabang Pangkalpinang, serta Junanto Kurniawan selaku Kepala Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai Tipe C Pangkalpinang.

Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejagung, penyidik menduga terdapat upaya mengondisikan pemeriksaan sampel sehingga kandungan LTJ tidak tercantum dalam laporan hasil pemeriksaan. Kondisi tersebut kemudian diduga memungkinkan PT PMM melakukan ekspor material yang mengandung LTJ.

Jumlah material yang menjadi perhatian penyidik mencapai sekitar 390 ton. Kejagung sebelumnya menyebut material tersebut berada dalam 15 kontainer dan telah diamankan untuk proses penyidikan. Penyidik juga mengungkap dugaan adanya dua pengiriman sebelumnya yang telah lolos, meski jumlah material yang telah terkirim masih ditelusuri. ● (Egi)

Kimberly Ryder Angkat Isu Kesehatan Mental

JAKARTA |
Harian Merdeka

Aktris Kimberly Ryder mengangkat isu kesehatan mental yang kerap dialami perempuan usai berumah tangga ke atas panggung teater. Melalui monolog bertajuk *Aku Masih di Sini*, ia menyoroti pergulatan batin seorang istri dan ibu yang dituntut memikul ekspektasi tinggi hingga rentan mengalami tekanan psikologis.

Kimberly Ryder menilai perubahan drastis dalam kehidupan perempuan pascapernikahan sering kali memicu kelelahan emosional. Fokus hidup yang semula tertuju pada pengembangan diri dan cita-cita pribadi mendadak bergeser total demi melayani kebutuhan keluarga.

“Kita saat sudah menjadi seorang istri atau seorang apalagi seorang ibu, kita dari yang tadinya kita punya mimpi-mimpi sendiri, harapan dan hobi, apa segala macam, harus shift ke peran yang berbeda, which is sebagai istri dan ibu,” kata Kimberly Ryder saat ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2026).

Tuntutan tersebut tak jarang membuat perempuan perlahan kehilangan jati diri. Ibu dua anak itu mencontohkan karakter yang ia perankan, yaitu seorang perempuan yang gemar menari balet namun terpaksa melupakan minatnya tersebut hingga berdampak buruk pada kondisi psikologisnya.

“Tapi sayangnya terkadang kita dalam peran baru ini kita ada kehilangan identitas diri kita sendiri. ‘Gua tahu banyak banget tentang anak-anak gua, tapi tentang diri

sendiri kok kayaknya hilang ya semua itu,’” tuturnya.

Situasi tersebut kian diperberat oleh pandangan lingkungan yang mengharuskan seorang ibu mengesampingkan kebahagiaan pribadinya. Menurutnya, pola pikir semacam ini perlu diluruskan agar para ibu rumah tangga tidak merasa bersalah ketika meluangkan waktu untuk merawat diri sendiri.

“Boleh lho kamu mencintai diri kamu sendiri, gak cuma mencintai

anak-anak kamu doang 100 persen. Memang iya, kita sayang banget sama anak-anak kita, tapi kita juga harus sayang sama diri kita sendiri,” ungkapnya.

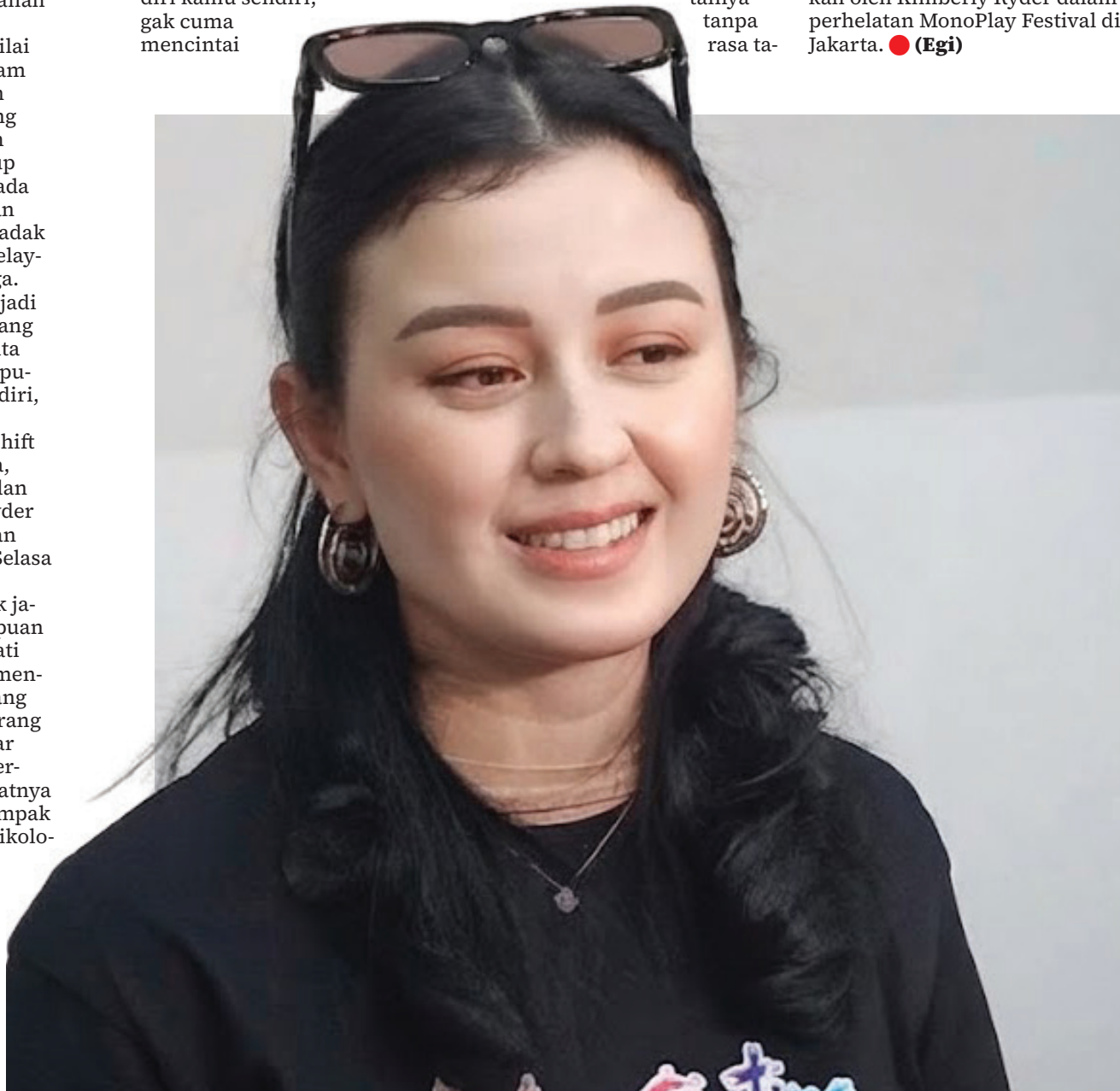
Kakak Natasha Ryder itu menekankan pentingnya bagi kaum hawa untuk terus bangkit dan belajar melepaskan tekanan tanpa harus terbebani oleh standar kesempurnaan. Setiap perempuan berhak menentukan batas kemampuan men-

talnya
tanpa
rasa ta-

kut akan penilaian orang lain.

“Kita coba lagi, kita coba lagi, dan besok kita bisa lebih baik lagi sebagai seorang istri, sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, dan supaya lebih baik lagi ke depannya, lebih waras lagi. Karena semua orang punya jalan mereka sendiri, punya struggle-nya mereka sendiri,” pungkasnya.

Pementasan monolog *Aku Masih di Sini* yang sarat pesan kesehatan mental ini dipentaskan oleh Kimberly Ryder dalam perhelatan MonoPlay Festival di Jakarta. ● (Egi)





Dituding Underbow PKI di Majalah Kemenag, GMNI Tempuh Jalur Hukum

JAKARTA | **Harian Merdeka**

Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) melaporkan pejabat Kementerian Agama (Kemenag) Koordinator Wilayah Jawa Timur ke Bareskrim Polri.

Hal tersebut buntut beredarnya majalah yang disebut diproduksi Kemenag, yang isinya dianggap menyudutkan GMNI.

Dalam sebuah artikel pada majalah bernama Mimbar Pembangunan Agama tersebut, GMNI disebutkan merupakan underbow atau organisasi sayap Partai Komunis Indonesia (PKI).

Laporan polisi ini teregister dengan nomor: STTL/442/IX/2026/BARESKRIM.

“Itu adalah bagian daripada upaya distorsi memutarbalikkan fakta dan sejarah, itu yang pertama. Yang kedua, agenda tersebut sangat keji. Karena itu dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan,” ujar Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta, Selasa, 22 September 2026.

Menurut dia, Marhaenisme yang merupakan ideologi GMNI, itu berbeda dengan ideologi PKI yakni komunisme. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno, selaku pencetus Marhaenisme. Menurut Bung Karno, lanjut Sujahri, salah satu nilai pada Marhaenisme ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kami GMNI merasa dirugikan karena momentum ini keluar bertepatan dengan rekrutmen mahasiswa baru di berbagai kampus se-Indonesia. Sehingga kami merasa dirugikan atas narasi yang dibangun,” tutur Sujahri.

Pihaknya sudah mengirim somasi terhadap beredarnya artikel pada majalah itu. Namun, tuntutan dalam somasi tersebut dinilai GMNI belum terpenuhi. Karenanya jalur hukum pun ditempuh.

Total tujuh pengacara mendampingi DPP GMNI dalam laporan ini. Salah satunya ialah Sudi Sumberta Simarmata, yang merupakan pelapor. Menurut Sudi, ada tiga orang yang dilaporkan dalam perkara ini. ● (Egi)

Sebanyak 38 PWI Daerah, Terkonsolidasi Portal Digital



JAKARTA |
Harian Merdeka

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat terus memperkuat transformasi dan konsolidasi organisasi di ruang digital. Setelah meluncurkan podcast PWI Channel, PWI kini mempersiapkan konsolidasi 38 portal PWI Daerah di seluruh Indonesia yang akan di-grand launching secara serentak pada 1 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila.

Persiapan konsolidasi website tersebut dibahas dalam rapat di Kantor PWI Pusat, lantai 4 Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir yang didampingi Sekretaris Jenderal PWI Pusat, Marthen Selamat Susanto, Ketua Bidang Multimedia dan IT Hilman Hidayat, Ketua Bidang Penyiaran Auri Jaya, pengurus PWI Pusat lain, serta puluhan pengurus PWI Daerah selaku admin portal daerah yang bergabung melalui zoom.

Dalam rapat tersebut dibahas kesiapan jaringan website PWI, aktivasi portal di seluruh daerah, pengelolaan dan produksi konten, hingga penguatan sinergi pemberitaan antara PWI Pusat dan PWI Daerah menjelang

peluncuran serentak 1 Oktober 2026.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir mengatakan, persiapan jaringan website PWI saat ini telah memasuki tahap akhir. Sebanyak 38 portal daerah telah disiapkan dan selanjutnya akan diaktifkan serta mulai diisi konten secara rutin menjelang peluncuran resmi.

“Ibaratnya saat ini mobil sudah keluar dari showroom, tinggal dipanaskan mesinnya dan kita siap berlari pada 1 Oktober 2026, tepat di Hari Kesaktian Pancasila,” kata Akhmad Munir.

Menurutnya, keberadaan 38 portal daerah tersebut menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem informasi PWI yang terkonsolidasi dari pusat hingga daerah. Melalui jaringan ini, kegiatan organisasi, informasi jurnalistik, program peningkatan kompetensi wartawan, hingga berbagai isu dari daerah dapat terhubung dalam satu ekosistem digital PWI.

“Website ini bukan hanya milik PWI Pusat, tetapi menjadi rumah bersama bagi PWI di seluruh Indonesia. Dengan 38 portal daerah yang terkonsolidasi, kita ingin informasi dan kegiatan PWI dari Aceh sampai Papua dapat terhubung, saling menguatkan, dan mendapatkan ruang pub-

likasi yang lebih luas,” ujar Akhmad Munir.

Menjelang grand launching, seluruh PWI Daerah diminta segera mengaktifkan portal masing-masing dan mulai melakukan pengisian konten.

Setiap PWI Daerah juga diminta menunjuk seorang person in charge (PIC) yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan portal. Masing-masing daerah didorong mulai membangun ritme produksi dengan mengunggah berita setiap hari.

“Karena itu, saya meminta seluruh PWI Daerah mulai mengaktifkan portalnya, menunjuk PIC dan memban- gun ritme pengisian konten sejak sekarang. Jangan menunggu 1 Oktober. Saat grand launching nanti, seluruh mesin harus sudah hidup dan 38 portal daerah sudah bergerak bersama,” tegasnya.

Untuk memperkuat sinergi konten antara PWI Pusat dan PWI Daerah, pengelola portal daerah dapat berkoordinasi dengan tim PWI Pusat. Sinergi tersebut diharapkan memungkinkan konten-konten penting dari daerah memperoleh distribusi yang lebih luas melalui jaringan PWI. Sebaliknya, informasi dari pusat juga dapat terdistribusi secara efektif hingga ke daerah.

● (BSS)

Wabup Tangerang Tegaskan Proses Hukum Kasus Pelecehan Pejabat Satpol PP

TANGERANG |
Harian Merdeka

Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan sikap tegas pemerintah daerah terhadap dugaan pelecehan seksual yang melibatkan Kasatpol PP Kabupaten Tangerang berinisial AS. Laporan dugaan kekerasan seksual yang dilakukan AS terhadap pegawainya tersebut kini resmi ditangani Polda Banten.

“Saya sebagai pimpinan perempuan juga tidak akan menormalisasi pelecehan dan bentuk kekerasan apapun,” ujar Intan saat dikonfirmasi, Selasa (22/9/2026).

Intan menyatakan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk menyelesaikan persoalan ini secara ob-

jektif dan transparan. Langkah hukum yang sedang berjalan di korps kepolisian dipastikan akan dikawal beriringan dengan proses internal birokrasi.

“Sudah ditindak sesuai aturan kepegawaian. Pertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat,” kata Intan Nurul Hikmah.

Hingga saat ini, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang dilaporkan juga telah bergerak untuk memproses status kepegawaian AS selaku terlapor. Pemkab Tangerang tidak akan memberikan ruang pembiaran bagi pelanggaran moral dan etika berat di dalam tubuh instansi.

Sementara, Aksi protes berupa penempelan poster solidaritas

untuk korban sempat bermunculan di Kantor Satpol PP Kabupaten Tangerang, yang mengindikasikan kuatnya desakan internal agar kasus ini diusut tuntas.

Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Maruli Hutapea, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dugaan pelecehan seksual oleh salah satu pejabat di lingkungan Pemkab Tangerang terhadap bawahannya.

Kata dia, penyidik diagenda-

kan segera memeriksa sejumlah saksi untuk menguji keabsahan laporan tersebut. Polisi akan menggali keterangan dari pihak-pihak yang diduga mengetahui, melihat, atau mendengar langsung peristiwa itu.

“Di dalam laporan, pelapor sudah menyebutkan inisial dan Tempat Kejadian Perkara (TKP). Nanti akan kami klarifikasi lagi karena ini juga akan melibatkan banyak pihak,” tandasnya.

● (Egi)

PLN dan Pemkab Serang Rencanakan Pembangunan PLTS di Pulau Tunda 2027



SERANG |
Harian Merdeka

PLN UP3 Banten Utara berencana membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Komunal di Pulau Tunda, Kabupaten Serang, pada tahun 2027. Rencana tersebut disam-

paikan usai audiensi dengan Pemkab Serang di Pendopo Bupati Serang, Selasa, 22 September 2026.

Manager PLN UP3 Banten Utara Hasudungan Siahaan mengatakan, Pulau Tunda akan dilayani melalui skema PLTS Komunal dalam program Listrik Desa

2027. Ia menambahkan, pembangunan masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran sehingga waktu pelaksanaannya belum ditentukan secara pasti.

Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah mengatakan, pembangunan PLTS tersebut menjadi upaya memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Pulau Tunda yang selama ini belum menikmati layanan listrik secara optimal.

Ratu mengatakan, rasio elektrifikasi di Kabupaten Serang saat ini telah mencapai 99,9 persen dari total 326 desa. Namun, Pulau Tunda masih menjadi satu-satunya wilayah yang belum mendapatkan layanan listrik penuh selama 24 jam.

“Insya Allah tahun 2027 Pulau Tunda akan dialiri listrik melalui PLTS,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Pemkab Serang

telah melakukan sejumlah upaya agar kebutuhan listrik masyarakat Pulau Tunda dapat segera terpenuhi. Upaya tersebut dilakukan melalui surat kepada Komisi XII DPR RI serta koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat.

Ratu menyebut, upaya tersebut mendapat respons dari pemerintah hingga Pulau Tunda masuk dalam program Listrik Desa tahun 2027. Menurutnya, kebutuhan listrik di Pulau Tunda menjadi perhatian karena masyarakat selama ini belum menikmati layanan listrik secara penuh.

“Kami berharap pembangunan PLTS dapat berjalan sesuai rencana sehingga pada 2027 masyarakat Pulau Tunda bisa menikmati layanan listrik seperti masyarakat di wilayah daratan Kabupaten Serang,” ucap dia. ● (Egi)

DITUDING UNDERBOW

isinya dianggap menyudutkan GMNI. Dalam sebuah artikel pada majalah bernama Mimbar Pembangunan Agama tersebut, GMNI disebutkan merupakan underbow atau organisasi sayap Partai Komunis Indonesia (PKI).

Laporan polisi ini teregister dengan nomor: STTL/442/IX/2026/BARESKRIM.

“Itu adalah bagian daripada upaya distorsi memutarbalikkan fakta dan sejarah, itu yang pertama. Yang kedua, agenda tersebut sangat keji. Karena itu dalam Al-Qur’an disebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan,” ujar Ketua Umum DPP GMNI, Sujahri Somar dalam keterangan yang diterima redaksi di Jakarta,

Selasa, 22 September 2026.

Menurut dia, Marhaenisme yang merupakan ideologi GMNI, itu berbeda dengan ideologi PKI yakni komunisme. Hal ini pun telah ditegaskan oleh Presiden pertama RI Soekarno atau Bung Karno, selaku pencetus Marhaenisme. Menurut Bung Karno, lanjut Sujahri, salah satu nilai pada Marhaenisme ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kami GMNI merasa dirugikan karena momentum ini keluar bertepatan dengan rekrutmen mahasiswa baru di berbagai kampus se-Indonesia. Sehingga kami merasa dirugikan atas narasi yang dibangun,” tutur Sujahri.

Pihaknya sudah mengirimkan somasi terhadap beredarnya artikel pada majalah itu. Namun, tuntutan dalam somasi tersebut dinilai GMNI belum terpenuhi. Karenanya jalur hukum pun ditempuh.

Total tujuh pengacara mendampingi DPP GMNI dalam laporan ini. Salah satunya ialah Sudi Sumberta Simarmata, yang merupakan pelapor. Menurut Sudi, ada tiga orang yang dilaporkan dalam perkara ini.

“Pertama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur, yang kedua pimpinan redaksi majalah Mimbar Pembangunan Agama, yang ketiga penulis sendiri, yang menulis tema di dalam majalah ini di halaman

28-29 di rubrik Teropong dengan judul ‘Awat Bahaya Laten Komunisme,’” ujarnya.

Ketiga orang tersebut, kata Sudi, dianggap GMNI bertanggung jawab atas beredarnya artikel yang menyudutkan organisasi. Mereka dijerat pasal dengan tentang ujaran kebencian dan berita hoaks.

“Pasalnya 243 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru tentang ujaran kebencian terhadap satu golongan. Kemudian juncto Pasal 263 tentang berita palsu,” jelas Sudi.

“Dan kami juga sempat diskusikan bagaimana kemudian kemungkinan tentang (menjerat pelapor dengan) UU ITE tadi,” imbuhnya. ● (Egi)

KORUPSI LAHAN

Selain Bustami, penyidik memeriksa seorang saksi lainnya berinisial BH dari Kementerian Kehutanan.

Anang mengatakan pemeriksaan kedua saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara tersebut.

“Proses penyidikan juga dilaksanakan secara profesional, independen, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan prinsip kehati-hatian,” katanya.

Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung sebelumnya mengambil alih penanganan perkara dugaan korupsi tersebut dari Kejaksaan Tinggi Lampung.

Dalam penyidikan perkara itu, Kejagung pada 10 September 2026 menyita uang senilai Rp1,003 triliun dan 166 ribu dolar AS dari PT PSMI. Penyidik kemudian menyita 11 kendaraan dari perusahaan tersebut pada 17 September 2026.

Terkait konstruksi perkara, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Saiful Bahri Siregar sebelumnya menjelaskan PT Inhutani V Lampung mendapatkan izin usaha pengelolaan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 398 Tahun 1996 tentang pemberian hak pengusahaan hutan tanaman industri.

Izin tersebut diberikan atas areal seluas sekitar 55.157 hektare yang termasuk dalam kawasan hutan produksi.

Menurut penyidik, PT PSMI sejak 2007 diduga secara melawan hukum mengelola lahan milik PT Inhutani V di Kabupaten Way Kanan dengan membuka kawasan hutan dan membangun perkebunan tebu seluas sekitar 32.375 hektare.

Pada 2013, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan audit dan menemukan adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pemanfaatan lahan hutan tersebut.

Setelah temuan tersebut, menurut Saiful, Direksi PT PSMI menandatangani nota ke-

sepehaman (memorandum of understanding/MoU) dengan PT Inhutani V (Persero) melalui pola kemitraan untuk pembangunan hutan tanaman tumpang sari.

Perjanjian tersebut diberlakukan surut sejak 2007 meskipun baru ditandatangani pada 2013.

“Artinya MoU yang ditandatangani di 2013 itu adalah perbuatan melawan hukum karena berlakunya surut sejak tahun 2007,” kata Saiful.

Kejagung menyatakan dugaan pembukaan kawasan hutan, penguasaan lahan, serta pembangunan perkebunan tebu dalam perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara.

● (Egi)

JASAD DI ENGGANO

mengenakan celana hitam, tinggi badan sekitar 163 cm, dan diperkirakan berusia 50 tahun.

“Terungkapnya identitas korban bermula dari proses identifikasi dan pencocokan data yang intensif. Kabid Dokkes Polda Bengkulu berkoordinasi dengan kabid Dokkes Polda Banten, didukung oleh tim disaster victim identification (DVI) Polri,” ujar Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dalam jumpa pers di Mapolda Banten, Rabu (23/9/2026).

Tim gabungan ini membandingkan data antemortem dan postmortem dari delapan keluarga korban yang hilang.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes)

Polri, genetik mayat Mr X terbukti identik dengan keluarga Surakman,” lanjut Irjen Hengki.

Kilas Balik Tragedi KM Arupadhatu 1

Surakman merupakan satu dari delapan orang yang berada di atas KM Arupadhatu 1. Kapal nahas tersebut bertolak dari Dermaga Pagedongan, Carita, Pandeglang, menuju kawasan Gunung Anak Krakatau pada Senin (7/9/2026) sekitar pukul 14.30 WIB.

Rombongan ini memiliki misi peliputan aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dari delapan orang di kapal, lima di antaranya adalah jurnalis, yakni M Bagus Khoerunnas (Antara), Arie Basuki (merdeka.com), Yudhistiro Pranoto (iNews), Firdaus Jaidi (Anadolu), dan

Donal (jurnalis lepas).

Sementara itu, tiga orang lainnya merupakan awak kapal, yakni Warta (kapten), Surakman (ABK), dan Heriyanto (pemandu).

Sebelum dinyatakan hilang kontak, rombongan sempat berkomunikasi dengan keluarga dan rekan sejawat. Bagus sempat mengirimkan swafoto bersama rekan-rekannya kepada sang istri, Desi Purnamasari.

Pada pukul 14.42 WIB, Bagus juga masih sempat mengabarkan posisinya kepada jurnalis Antara Biro Lampung yang berada di Pulau Sebesi. Komunikasi terakhir tercatat pada pukul 18.13 WIB, saat Heriyanto mengirimkan foto yang memperlihatkan dirinya berada di sekitar perairan Anak

Krakatau. Setelah itu, tidak ada lagi sinyal dari kapal tersebut.

Hilangnya kontak resmi dilaporkan oleh pimpinan Antara Biro Banten kepada Basarnas pada Selasa (8/9/2026). Laporan ini langsung direspons dengan operasi pencarian masif via laut dan udara.

Tim SAR gabungan telah menyisir perairan Gunung Anak Krakatau, Pulau Rakata, Pulau Panjang, Sebesi, Sebeku, Lagundi, Tanjung Tua, hingga kawasan Pulau Panaitan, Ujung Kulon, dan perairan Lampung sebelum akhirnya titik terang muncul dari pesisir Enggano. Namun, hingga hari kesepuluh pencarian tiga awak kapal dan lima jurnalis tidak ditemukan.

● (Egi)

INDONESIA VS SINGAPURA, GARUDA UNGGUL

JAKARTA |
Harian Merdeka

Indonesia akan berhadapan dengan Timnas Singapura dalam laga FIFA ASEAN Cup 2026. Skuad Garuda masih unggul head-to-head atas The Lions.

Indonesia vs Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (25/9/2026). Laga itu

akan kickoff pada pukul 20.00 WIB. Dalam catatan 11v11, Indonesia dan Singapura sudah berhadapan sebanyak 60 kali. Tim Merah Putih unggul jumlah kemenangan dengan catatan 30 kali. Singapura



mampu mencatatkan 19 kemenangan atas Indonesia. Dalam 11 laga lainnya, Indonesia vs Singapura selesai imbang. Dalam lima pertandingan terakhir, Indonesia membukukan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan sekali menelan kekalahan. Indonesia terakhir kali men-

jamu Singapura di SUGBK pada Desember 2008. Saat itu, Indonesia menelan kekalahan 0-2 dari Singapura pada ajang Piala AFF 2008. Pada laga yang berlangsung 9 Desember 2008 tersebut, gawang Indonesia dibobol oleh Baihakki Khaizan dan Shi Jiayi. **● (dts)**



terbit setiap sore Senin s/d Sabtu

HARIAN MERDEKA
aspirasi rakyat

Langganan ePaper...

Dapatkan berita terkini setiap sore langsung di perangkatmu.

Hanya **Rp30.000/bulan** Hubungin **Alan Oskar : +62 895-2285-1963**

